

# ANALISIS *FRAMING* MEDIA PEMBERITAAN *ONLINE* TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN COVID-19

Tiara Navy Argawidyanti  
NPP. 29.0704

*Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: navyatiara@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Covid-19 is a phenomenon that has been hotly discussed in recent years. Government policies are the things that are most highlighted, especially in efforts to contain the spread and handling of Covid-19. The existence of economic and political interests that often surround the media can affect the level of public support for government policies during the pandemic. **Purpose:** This study aims to determine framing media coverage online policies of the West Java Provincial Government in handling Covid-19, especially on the online Tirto.id, Tempo.co, and Republika.id. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach. A number of data were collected using observation and documentation techniques. Data were analyzed using the framing the Robert N. Entman model with elements including define problems (determine the problem), diagnose causes (estimate the cause of the problem), make moral judgment (make moral decisions), and treatment recommendations (provide suggestions for solutions). **Results:** Tirto.id and Tempo.co provide a neutral point of view on their news products regarding the policies of the West Java Provincial Government in handling Covid-19, while Republika.co.id, whose largest share is owned by Erick Thohir, gives a positive impression that tends to support the government through its news products. **Conclusion:** There is a relationship between media ownership and their point of view on government policy. Thus, it is hoped that the media can be more independent in presenting news from various points of view.

**Keywords:** Policy, Government, Covid-19, Media

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Covid-19 merupakan fenomena yang sedang hangat dibicarakan beberapa tahun terakhir. Kebijakan pemerintah merupakan hal yang paling disorot khususnya dalam upaya penanggulangan penyebaran dan penanganan Covid-19. Adanya kepentingan ekonomi dan politik yang kerap melingkupi media dapat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* pemberitaan media *online* terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 khususnya pada media *online* Tirto.id, Tempo.co, dan Republika.id. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Sejumlah data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman dengan unsur-unsur antara lain *define problems* (menentukan masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (memberikan saran penyelesaian). **Hasil/Temuan:** Tirto.id dan Tempo.co memberikan sudut pandang yang netral pada produk beritanya mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dalam penanganan Covid-19, sedangkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang saham terbesarnya dimiliki oleh Erick Thohir memberikan kesan positif yang cenderung mendukung pemerintah melalui produk pemberitaannya. **Kesimpulan:** Terdapat keterkaitan antara kepemilikan media dengan sudut pandangnya terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga, harapannya media dapat lebih independen dalam menyajikan pemberitaan dari berbagai sudut pandang.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah, Covid-19, Media

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi yang didapat melalui komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberi informasi kepada khalayak umum dan menggiring opini masyarakat luas untuk mendapatkan perhatian publik adalah komunikasi massa, yang diwujudkan ke dalam suatu media yang disebut media massa.

Adanya media massa dapat menjadi jembatan bagi pemerintah kepada masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan dan program-program pemerintahan. Oleh karena itu, cara penulis dalam menyampaikan berita akan sangat berpengaruh pada bagaimana cara masyarakat memahami suatu kebijakan yang ada.

Di samping perannya dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, pers atau media massa juga memiliki kepentingan tersendiri. Media massa kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk dapat mencapai kepentingan ekonomi dan kepentingan politik pihak tertentu. Dalam hal ekonomi, konten-konten dan narasi yang disajikan ke publik kerap kali hanya mengikuti trend dan selera pembaca (penerima informasi), namun tidak didukung dengan produk jurnalistik yang profesional. Hal ini semata-mata dilakukan hanya untuk mencapai target ekonomi melalui banyaknya pembaca dalam situs atau konten tertentu. Di sisi lain dalam hal politik, dewasa ini pemilik media massa mulai terjun ke dalam politik praktis dengan menjadi pendukung maupun pemangku jabatan-jabatan strategis dalam partai politik. Hal ini akan berdampak pada produk-produk jurnalistik yang cenderung terkesan membela atau antipemerintah akibat adanya kepentingan politik pemilik media yang bercampur dalam fungsi media massa itu sendiri sebagai komunikasi publik.

Media massa menggunakan *framing* pada setiap judul yang diberitakannya, misalnya dalam topik kebijakan pemerintah dan pandemi Covid-19. Kedua hal tersebut saling berkaitan, dikarenakan penggunaan *framing* akan mempengaruhi tingkat dukungan terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Lee dan Basnyat dalam Fahrimal dkk. (2020:172) yang menguji pengaruh *framing* pemberitaan pandemi H1N1 pada media massa di Singapura sebagai upaya untuk memperkuat dukungan positif pada kebijakan pemerintah.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyso dalam pemberitaan Tempo, selama tahun 2012 terdapat 98 pengaduan yang masuk ke Dewan Pers terkait pemberitaan media *online* atau media siber. Dari angka tersebut, 76% merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik. Pertama, sebanyak 30 (tiga puluh) kasus disebabkan karena media siber tidak melakukan konfirmasi dan tidak menguji informasi. Kedua, sebanyak 30 (tiga puluh) kasus disebabkan karena pemberitaan yang tidak akurat. Ketiga, sebanyak 17 (tujuh belas) kasus disebabkan karena mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Keempat, 10 (sepuluh) kasus disebabkan pemberitaan yang tidak berimbang. Kelima, sebanyak 3 (tiga) kasus dilaporkan karena tidak menyembunyikan

identitas korban kejahatan asusila. Terakhir yang keenam, 1 (satu) kasus dilaporkan karena tidak mencantumkan narasumber di dalam pemberitaan. Hingga tahun 2020, dikutip dari Antara News, berdasarkan data terbaru dari Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, dari 800 aduan yang masuk ke Dewan Pers dapat dipastikan bahwa 90% sampai 95% diantaranya merupakan pelanggaran-pelanggaran etik sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh media *online*. Akibatnya, tak jarang kita temui berita-berita yang berbau hoax yang sering dibalut dengan judul-judul clickbait.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Untuk dapat menunjang penelitian ini, terdapat beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan, antara lain Penelitian Arik Sofian dan Dra. Niken Lestarini (2020) dengan judul “Analisis *framing* pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Media *online* Koran.tempo.co memiliki sikap yang pesimis dan cenderung mengkritik pemerintah karena belum juga mendapatkan hasil dari setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam hal penanganan Covid-19.

Selanjutnya Maulidatus Syahrotin Naqqiyah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Media *Online* CNN Indonesia.com dan Tirto.id mengenai Kasus Pandemi Covid-19”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada pemberitaan CNN Indonesia.com dan Tirto.id yang menciptakan opini positif bagi pembacanya.

Penelitian mengenai analisis *framing* juga dilakukan oleh Citra Hayati Nainggolan dan S. Rouli Manalu, Ph.D (2017) dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Ganjar Pranowo dalam Kasus Korupsi E-KTP (Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka periode Agustus-November 2015 dan Maret 2017)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap yang ditunjukkan ketiga media dalam menyikapi pemberitaan terkait kasus tersebut.

Rieka Mustika (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Framing* Pemberitaan Media *Online* Kasus Pedofilia di Akun Facebook”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pembingkai dalam berita yang dimunculkan oleh Kompas.com dan Republika Online khususnya dalam hal pemilihan narasumber.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayub Dwi Anggoro (2016) dengan judul “Analisis *Framing* Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV”. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keberpihakan media pada masing-masing pasangan calon presiden dalam pemilu 2014-2019.

### 1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian lainnya baik dari jenis media yang digunakan hingga jumlah media yang diteliti. Pada penelitian mengenai analisis *framing* media ini, penulis memilih menggunakan tiga media pemberitaan *online* yaitu Tirto.id, Tempo.co, dan Republika.co.id. sebagai pembanding.

Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada pemberitaan terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian lain berfokus pada pemberitaan terkait penanganan Covid-19 dalam lingkup nasional. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Citra Hayati Nainggolan dan Ayub Dwi Anggoro keduanya membahas topik lain yang tidak berhubungan dengan pandemi Covid-19.

Terakhir, perbedaan terletak pada model analisis yang digunakan. Di mana pada penelitian ini model analisis yang digunakan adalah analisis *framing* Robert N. Entman sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulidatus Syahrotin Naqqiyah dan Citra Hayati Nainggolan menggunakan model analisis *framing* Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* pemberitaan media *online* terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman yang diantaranya *define problems* (menentukan masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (memberikan saran penyelesaian). Sedangkan, media yang digunakan antara lain Tirto.id, Tempo.co dan Republika.co.id dengan objek penelitian merupakan pemberitaan-pemberitaan yang dikeluarkan oleh ketiga media tersebut terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 dalam kurun waktu antara 1 Desember tahun 2021 sampai dengan 31 Januari tahun 2022. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati isi pemberitaan yang ada di media pemberitaan *online* khususnya pada pemberitaan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengambil rekaman terhadap sampel-sampel pemberitaan *online* terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

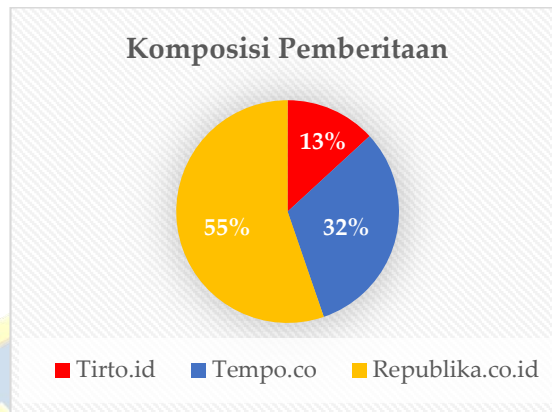
## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sepanjang 1 Desember 2021 hingga 31 Januari 2022, didapatkan data bahwa ketiga media memiliki komposisi yang berbeda dalam memproduksi pemberitaan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan portal berita Republika.co.id berhasil memproduksi berita terbanyak, yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) pemberitaan, sedangkan Tempo.co memproduksi sebanyak 12 (dua belas) pemberitaan dan Tirto.id sebanyak 5 (lima) pemberitaan sehingga merupakan media yang paling sedikit memproduksi berita terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Komposisi pemberitaan pada ketiga media dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:

Gambar 1.

Komposisi Pemberitaan Pada Ketiga Media



Sumber: diolah oleh penulis (2022)

3.1.1 *Frame* Pemberitaan Tirto.id

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori analisis *framing* Robert N. Entman didapati bahwa Tirto.id memiliki kecenderungan untuk bersikap netral dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam hal penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Jurnalis Tirto.id tidak menambahkan opininya ke dalam pemberitaan, sehingga pemberitaan hanya bersifat reportase dari apa yang narasumber terangkan pada wawancara yang dilansir dari Antara News. Dalam menarasikan pemberitaannya, Tirto.id masih belum mampu menghadirkan narasumber yang majemuk, sehingga produk berita yang dikeluarkan hanya berasal dari satu sudut pandang narasumber saja.

Artikel Berita 1

**Judul Berita:** Ridwan Kamil Serahkan Kebijakan PTM 100% ke Pemda Kabupaten/Kota

**Tanggal:** 04 Januari 2022

Tabel 1.

Hasil Penelitian Artikel Berita 1

Elemen	Temuan
<i>Define problems</i> (menentukan masalah)	Pokok pembicaraan pada artikel ini adalah mengenai Gubernur Jawa Barat yang menyerahkan sepenuhnya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kepada setiap kepala daerah di Kabupaten dan Kota. Ketidak mampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil keputusan sendiri dalam menetapkan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% mengharuskan Pemerintah Provinsi untuk mengembalikan kebijakan tersebut kepada Pemerintah daerah

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
	Kabupaten dan Kota yang lebih memahami kondisi perkembangan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
<b><i>Diagnose causes</i></b> <b>(memperkirakan penyebab masalah)</b>	Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, keputusan tersebut dibuat akibat adanya perbedaan kondisi Covid-19 di setiap daerah di Provinsi Jawa Barat.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(membuat keputusan moral)</b>	Pada bagian ini, lebih lanjut jurnalis menambahkan keterangan lainnya yaitu pernyataan Sang Gubernur yang mengatakan bahwa tidak semua daerah di Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan kasus Covid-19 yang pesat. Sehingga, kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% perlu dikembalikan kepada Pemerintah daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota. Di sisi lain dalam membuat keputusan moral, jurnalis tidak menambahkan opininya mengenai pokok pembicaraan tersebut.
<b><i>Treatment recommendation</i></b> <b>(memberikan saran penyelesaian)</b>	Pada bagian ini, jurnalis menyampaikan adanya catatan sebagai syarat dari Ridwan Kamil agar setiap daerah tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum menetapkan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

## Artikel Berita 2

**Judul Berita:** BIN Jawa Barat Bidik Anak SD Divaksin COVID-19 demi Bisa PTM

**Tanggal:** 15 Desember 2021

**Tabel 2.**

### Hasil Penelitian Artikel Berita 2

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b><i>Define problems</i></b> <b>(menentukan masalah)</b>	Pokok pembicaraan pada artikel ini adalah mengenai Badan Intelijen Negara (BIN) yang melaksanakan program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia sekolah dasar di Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan suatu gebrakan Badan Intelijen Negara (BIN)

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
	Daerah Jawa Barat karena merupakan kegiatan vaksinasi anak pertama yang dilakukan di Indonesia.
<b>Diagnose causes</b> (memperkirakan penyebab masalah)	Program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun ini dilakukan untuk menciptakan herd immunity dalam rangka mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mendatang.
<b>Make moral judgement</b> (membuat keputusan moral)	Lebih lanjut, jurnalis menjelaskan melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jawa Barat, bahwa Program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan sudah diperbolehkan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.01.02/4/3309/2021.
<b>Treatment recommendation</b> (memberikan saran penyelesaian)	Pada bagian ini, jurnalis menyampaikan berdasarkan kutipan wawancara yang bersumber dari Antara News adapun strategi yang dilakukan oleh Kepala BIN Daerah Jawa Barat dalam mempercepat program vaksinasi anak adalah dengan menambah dosis vaksin Covid-19 bagi pelajar di tingkat Sekolah Dasar.

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

### Artikel Berita 3

**Judul Berita:** Ridwan Kamil Izinkan Kota Bogor Setop PTM akibat Kasus COVID Naik

**Tanggal:** 31 Januari 2022

**Tabel 3.**

#### Hasil Penelitian Artikel Berita 3

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b>Define problems</b> (menentukan masalah)	Artikel ini membahas mengenai urgensi dari dikeluarkannya keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan penutupan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Bogor. Padahal,

Elemen	Temuan
	Pembelajaran Tatap Muka (PTM) merupakan salah satu hal yang menjadi fokus kebijakan pemerintah saat ini.
<b>Diagnose causes</b> (memperkirakan penyebab masalah)	Penutupan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tersebut dilatar belakangi adanya laporan dari Walikota Bogor, Bima Arya kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait adanya peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.
<b>Make moral judgement</b> (membuat keputusan moral)	Dalam membuat keputusan moral, tidak ada opini yang disampaikan jurnalis, melainkan hanya mengutip wawancara Sang Gubernur yang membenarkan keputusan tersebut dengan alasan bahwa Bogor, Depok dan Bekasi merupakan titik rawan ditemukannya kasus Covid-19, sehingga sangat memungkinkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat situasional pada wilayah tersebut.
<b>Treatment recommendation</b> (memberikan saran penyelesaian)	Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, jurnalis kembali mengutip pernyataan Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat yang meminta seluruh jajaran Bupati atau Walikota di Jawa Barat dan kepala daerah di wilayah Jabodetabek untuk terus memantau perkembangan kasus Covid-19 khususnya di lingkungan sekolah dalam laporan harian.

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

### 3.1.2 Frame Pemberitaan Tempo.co

Berdasarkan hasil penelitian pada media pemberitaan Tempo.co, Tempo.co memiliki kecenderungan untuk bersikap netral dalam menarasikan setiap pemberitaannya. Hal ini didukung dengan komposisi narasumbernya yang cenderung tunggal dan mengarah kepada satu sudut pandang namun tidak dibumbui dengan argumen-argumen pribadi jurnalisnya. Adapun alasan lainnya adalah dikarenakan kurangnya sikap kritis dari jurnalis dalam menyajikan berita. Padahal, terdapat pokok-pokok permasalahan dalam berita yang seharusnya dapat dijelaskan penyebabnya.

#### Artikel Berita 4

**Judul Berita:** Sekolah Tatap Muka Penuh di Jawa Barat Dilaksanakan Februari 2022, Asal..

**Tanggal:** 30 Desember 2021



**Tabel 4.****Hasil Penelitian Artikel Berita 4**

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b><i>Define problems</i></b> <b>(menentukan masalah)</b>	Pokok permasalahan dalam pemberitaan ini diawali dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi yang mengatakan bahwa Pembelajaran Tatap Muka penuh di Jawa Barat direncanakan akan berlangsung pada Bulan Februari tahun 2022. Rencana Pembelajaran Tatap Muka penuh yang terus berubah dan belum dapat dipastikan tersebut menunjukkan adanya keraguan dari pemerintah dalam menetapkan jadwal sekolah Tatap Muka Penuh akibat ketidakpastian perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.
<b><i>Diagnose causes</i></b> <b>(memperkirakan penyebab masalah)</b>	Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan tersebut belum bisa dipastikan sepenuhnya dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi kasus Covid-19 pasca liburan Natal dan Tahun Baru yang mungkin saja dapat terjadi lonjakan.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(membuat keputusan moral)</b>	Pada bagian ini, jurnailis menambahkan pernyataan lain yang menjadi penyebab keraguan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tersebut dalam menetapkan jadwal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah dikarenakan belum meratanya status PPKM di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dimana Pembelajaran Tatap Muka 100 (seratus) persen hanya dapat dilakukan di daerah-daerah dengan status PPKM yang sudah mencapai Level 1.
<b><i>Treatment recommendation</i></b> <b>(memberikan saran penyelesaian)</b>	Pada pemberitaan ini, jurnalis tidak menyampaikan saran penyelesaian secara eksplisit. Namun, jurnalis menambahkan data baru yang menjelaskan masih rendahnya angka vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun sehingga untuk mengatasi permasalahan Pembelajaran Tatap Muka

Elemen	Temuan
	(PTM) tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan angka vaksinasi untuk anak di usia sekolah.

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

## Artikel Berita 5

**Judul Berita:** Semua Alun-alun di Jawa Barat Wajib Tutup Selama Libur Natal dan Tahun Baru

**Tanggal:** 23 Desember 2021

**Tabel 5.**

### Hasil Penelitian Artikel Berita 5

Elemen	Temuan
<i>Define problems</i> (menentukan masalah)	Pokok pembicaraan dalam pemberitaan ini adalah mengenai pernyataan Ridwan Kamil yang memutuskan penutupan seluruh alun-alun di Jawa Barat selama libur Natal dan tahun baru. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memperketat tempat wisata dan meniadakan kegiatan perayaan tahun baru.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Keputusan ini diambil guna mencegah adanya kerumunan yang akan meningkatkan resiko penularan kasus Covid-19.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Keputusan yang diambil oleh Ridwan Kamil tersebut dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru.
<i>Treatment recommendation</i> (memberikan saran penyelesaian)	Tidak ditemukan adanya saran dari jurnalis dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, namun melalui kutipan wawancara yang bersumber dari Antara News, Ridwan Kamil memastikan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya umat Nasrani yang akan beribadah dengan melakukan pengamanan di berbagai titik strategis.

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

## Artikel Berita 6

**Judul Berita:** Ridwan Kamil Minta PeduliLindungi Jangan Sekedar Basa-Basi

**Tanggal:** 23 Desember 2021

**Tabel 6.**

**Hasil Penelitian Artikel Berita 6**

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b><i>Define problems</i></b> <b>(menentukan masalah)</b>	Permasalahan yang diangkat dalam pemberitaan ini adalah mengenai evaluasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada rapat koordinasi persiapan libur Natal dan Tahun Baru yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
<b><i>Diagnose causes</i></b> <b>(memperkirakan penyebab masalah)</b>	Permasalahan ini diawali dengan adanya temuan Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana yang mendapati adanya pengabaian pembatasan jumlah pengunjung oleh pengelola salah satu objek wisata di Jawa Barat.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(membuat keputusan moral)</b>	Tidak ada tanggapan atau opini yang disampaikan jurnalis mengenai permasalahan ini. Namun, melalui kutipan wawancara yang dilakukan dengan Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat, beliau menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi berguna untuk skrining pengunjung sehingga harus digunakan sebagaimana mestinya.
<b><i>Treatment recommendation</i></b> <b>(memberikan saran penyelesaian)</b>	Pada bagian ini, tidak ada satupun saran yang disampaikan jurnalis mengenai permasalahan tersebut. Namun, jurnalis memberikan kutipan wawancara Ridwan Kamil yang meminta agar pihak kepolisian turut membantu mengawasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan ketat bahkan menjatuhkan sanksi bagi pengelola objek wisata yang melanggar.

*Sumber: diolah oleh penulis (2022)*

### 3.1.3 Frame Pemberitaan Republika.co.id

Berbeda dengan kedua media lainnya, Republika.co.id menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menampilkan narasumber-narasumber yang lebih majemuk, khususnya yang berasal dari kalangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga, menciptakan *tone* positif yang mendukung pernyataan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Pemberitaan yang disajikanpun murni tulisan jurnalis Republika.co.id dan bukan merupakan kutipan dari sumber atau media pemberitaan yang lain. Di sisi lain, pemberitaan dilengkapi dengan dasar hukum dan data-data, sehingga lebih akurat dibandingkan dengan kedua media pemberitaan lainnya.

#### Artikel Berita 7

**Judul Berita:** Omicron Masuk Jawa Barat, PTM Tetap Berjalan

**Tanggal:** 12 Januari 2022

**Tabel 7.**

**Hasil Penelitian Artikel Berita 7**

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b><i>Define problems</i></b> <b>(menentukan masalah)</b>	Pokok pembicaraan dalam pemberitaan ini adalah mengenai pernyataan Ridwan Kamil yang menegaskan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap dilaksanakan meskipun ditemukan warga Jawa Barat yang terindikasi positif Omicron. Di dalam pemberitaan yang disampaikan, jurnalis tidak terfokus pada kasus masuknya Omicron di Jawa Barat, melainkan lebih terfokus pada tindakan tegas pemerintah dalam mengambil kebijakan.
<b><i>Diagnose causes</i></b> <b>(memperkirakan penyebab masalah)</b>	Melalui wawancara yang dilakukan, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Pembelajaran Tatap Muka masih dapat dilaksanakan mengingat angka kasus Omicron di Jawa Barat yang masih terkendali.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(membuat keputusan moral)</b>	Pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut didukung oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang menerangkan bahwa belum ditemukannya kasus Omicron di Kota Bogor dan penambahan kasus Covid-19 terpantau masih tergolong landai.
<b><i>Treatment recommendation</i></b> <b>(memberikan saran)</b>	Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan gerakan 3T

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b>penyelesaian)</b>	dan memperketat pemantauan terhadap warga yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

*Sumber: diolah oleh penulis (2022)*

### Artikel Berita 8

**Judul Berita:** Tidak Ada Pesta Perayaan Tahun Baru di Wilayah Jabar

**Tanggal:** 16 Desember 2021

**Tabel 8.**  
**Hasil Penelitian Artikel Berita 8**

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b><i>Define problems</i></b> <b>(menentukan masalah)</b>	Pokok pembicaraan dalam pemberitaan ini bermula saat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan larangan segala jenis perayaan tahun baru di wilayah Jawa Barat.
<b><i>Diagnose causes</i></b> <b>(memperkirakan penyebab masalah)</b>	Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sang Gubernur, larangan tersebut dibuat mengingat masih adanya potensi penularan Covid-19 meskipun kasusnya mulai menurun.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(membuat keputusan moral)</b>	Larangan tersebutpun didukung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki tanggung jawab lebih untuk mencegah peningkatan Covid-19 di akhir tahun 2021 dikarenakan lokasinya yang merupakan jalur mobilitas masyarakat khususnya dari Jakarta dan merupakan destinasi wisata favorit bagi masyarakat.
<b><i>Treatment recommendation</i></b> <b>(memberikan saran penyelesaian)</b>	Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Budi menyarankan agar pemerintah Provinsi dapat terus memperketat protokol kesehatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap status vaksinasi di Jawa Barat.

*Sumber: diolah oleh penulis (2022)*

### Artikel Berita 9

**Judul Berita:** Ridwan Kamil Ancam Sanksi ASN Jabar yang Cuti saat Libur Nataru

**Tanggal:** 15 Desember 2021

**Tabel 9.****Hasil Penelitian Artikel Berita 9**

<b>Elemen</b>	<b>Temuan</b>
<b><i>Define problems</i></b> <b>(menentukan masalah)</b>	Pokok pembicaraan dalam pemberitaan ini bermula saat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menetapkan larangan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan cuti daerah saat libur Natal dan Tahun Baru.
<b><i>Diagnose causes</i></b> <b>(memperkirakan penyebab masalah)</b>	Kebijakan tersebut dibuat untuk mengurangi angka dan menekan kasus penularan Covid-19 di Jawa Barat saat libur Natal dan tahun baru.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(membuat keputusan moral)</b>	Dalam membuat keputusan moral, jurnalis Republika.co.id turut mencantumkan dasar hukum apa saja yang melandasi dikeluarkannya kebijakan larangan tersebut, yang diantaranya adalah Surat Edaran MenpanRB Nomor 26 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembatasan kegiatan cuti dan ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara selama libur Natal dan tahun baru 2022. Selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara sebagai teladan dalam menerapkan protokol kesehatan.
<b><i>Treatment recommendation</i></b> <b>(memberikan saran penyelesaian)</b>	Sehingga, untuk mengatasi adanya pelanggaran terhadap kebijakan tersebut jurnalis kembali mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 sebagai sanksi disiplin PNS.

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

### 3.2 Pembahasan

Hasil penelitian di atas mengkonfirmasi bahwa media memiliki kecenderungan dalam melakukan *framing* dengan cara menyeleksi informasi serta menonjolkan aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan. Peniadaan informasi yang seharusnya disampaikan, baik dari sisi narasumber maupun sikap kritis jurnalis dalam memperkirakan penyebab masalah merupakan cara media dalam menentukan sikap atau kecenderungannya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komposisi narasumber pada pemberitaan Tirto.id dan Tempo.co yang menyebabkan kedua media cenderung bersikap netral dan tidak dapat menentukan sikapnya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, terkait penonjolan aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan,

Republika.co.id lebih banyak menampilkan narasumber yang memiliki kecenderungan sikap pro terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Republika.co.id memilih narasumber-narasumber pendukung yang juga berasal dari golongan pemerintah itu sendiri baik di tingkat pusat maupun daerah, dan menyeleksi narasumber-narasumber lain sehingga tentu saja menciptakan sudut pandang yang positif akibat adanya sinergitas tersebut.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berbagai penelitian telah menghasilkan temuan bahwa terdapat keterkaitan antara kepemilikan media dengan sikap yang diambil oleh media dalam pemberitaan. Seperti Sari (2018:84) yang menemukan bahwa terdapat pola dukungan dari dua media daring, yakni detik.com dan okezone.com kepada masing-masing kandidat calon presiden Indonesia pada pemilu 2014. Begitu juga sebagaimana yang ditemukan oleh Ekayanti dan Xiaoming (2017:50) bahwa kepentingan politik pemilik surat kabar tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai profesionalitas jurnalis, melainkan mempengaruhi praktik-praktik intervensi di ruang media. Selain itu, hasil penelitian Valerisha (2016:31) juga menunjukkan bahwa praktik konglomerasi media mempengaruhi kualitas daripada ruang publik. Sebagaimana penelitian di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat keterkaitan antara kepemilikan media dengan sudut pandangnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana pada media pemberitaan *online* Republika.co.id yang saham terbesarnya dimiliki oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir, pemberitaan didominasi oleh *tone* positif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Perlu diketahui bahwa baik Erick Thohir maupun Ridwan Kamil keduanya memiliki posisi pada pemerintahan dan memiliki hubungan baik dalam kerja sama memajukan investasi di Jawa Barat.

## IV. KESIMPULAN

Terdapat persamaan dan perbedaan pada *framing* pemberitaan yang digunakan oleh ketiga media *online* terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Pada media *online* Tirto.id dan Tempo.co, persamaan terletak pada sudut pandang kedua media yang netral terhadap pemberitaan atau isu-isu mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Hal berbeda ditunjukkan oleh media *online* Republika.co.id yang memiliki sudut pandang positif terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut juga membuktikan bahwa terdapat keterkaitan antara kepemilikan Republika.co.id yang saham terbesarnya dimiliki oleh Erick Thohir sehingga sudut pandang penulisan beritanya lebih berpihak kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, melalui penelitian ini hendaknya Republika.co.id dapat bersikap netral dalam menyajikan pemberitaan mengenai isu-isu kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dukungan perlu diberikan kepada semua pihak khususnya pemerintah terutama dalam mengambil kebijakan dalam penanganan Covid-19, namun akan lebih baik apabila jurnalis dapat lebih independen dalam menyajikan pemberitaan dengan menghadirkan sudut pandang dari berbagai sisi. Di sisi lain, hendaknya Tirto.id dan Tempo.co dapat menghadirkan narasumber yang lebih beragam sebagai interpretasi dari berbagai golongan baik yang mendukung maupun menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga, pembaca memiliki berbagai sudut pandang yang dapat dikaji dalam memaknai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam hal penanganan Covid-19.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini masih terbatas pada data-data yang dikumpulkan melalui internet (secara *online*).

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih terbatasnya data-data yang dikumpulkan dalam penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan kedepannya agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan teknik wawancara kepada pihak-pihak dari instansi terkait maupun pimpinan yang ada pada suatu media pemberitaan *online*.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Penguji yang telah membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Trimansyah, B. 2016. *Melejitkan Daya Literasi Indonesia*. Jakarta: Institut Penulis Indonesia.
- Anggoro, A. D., 2014. “*Media, Politik dan Kekuasaan*”, Jurnal Aristo Vol.2, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Anom, E., 2015. “*Landasan Kebebasan Media di Indonesia*”, Jurnal Komunikologi Vol.12, Jakarta: Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Djauhar, A., 2019. “*Jurnalisme di Era Digital*”, Jurnal Dewan Pers Vol.20, Jakarta: Dewan Pers.
- Ekayanti, M., dan Xiaoming, H., 2017. “*Jurnalism and Political Afiliation of The Media: Influence of Ownership on The Indonesia Newspapers*”, Sage Journals.
- Fahrimal, Y., Husna, A., Islami, F., dan Johan., 2020. “*Media dan Pandemi: Frame tentang Pandemi Covid-19 dalam Media Online di Indonesia*”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Aceh: Universitas Teuku Umar.
- He, X., dan Zhou, X., 2015. “*Contrastive Analysis of Lexical Choice and Ideologies in News Reporting the Same Accidents between Chinese and American Newspapers*”, Theory and Practice in Language Studies Vol.5, Xi'an: Chang'an University.
- Insan, J., 2020. “*Independensi Ruang Redaksi (Catatan Tayangan Berita Pilpres di TV)*”, Jurnal Dewan Pers Vol.21, Jakarta: Dewan Pers.
- Masyhuri, K., 2016. “*Media Massa Sebagai Wujud Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Islam*”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Lumajang: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.
- Muslim., 2013. “*Konstruksi Media tentang Serangan Israel terhadap Libanon*”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.17, Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Nainggolan, C. H., dan Manalu, S. R., 2017. “*Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo dalam Kasus Korupsi E-KTP*”, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Naqqiyah, M. S., 2020. “*Analisis Framing Pemberitaan Online CNN Indonesia.com dan Tirto.id mengenai Kasus Pandemi Covid-19*”, Jurnal Kopsis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nuh, M., 2020. “*Pers dan Dinamika Politik di Indonesia*”, Jurnal Dewan Pers Vol.21, Jakarta: Dewan Pers.
- Sari, I. P., 2018. “*Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden 2014*”, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol.21, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Sofian, A., dan Lestarini, N., 2020. “*Analisis Framing Pemberitaan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kasus Covid-19*”, Commicast, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Valerisha, A., 2016. “*Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.